

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Angkatan kerja dengan bantuan faktor-faktor produksi lainnya setiap tahun menghasilkan sejumlah besar barang dan jasa yang disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>1</sup> PDB tersebut menjadi salah satu indikator pendapatan nasional suatu negara. Jadi, perekonomian suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila terjadi kenaikan kapasitas produksi yang digambarkan dalam bentuk kenaikan PDB. Pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menilai dan membandingkan kondisi perekonomian antara suatu daerah dengan daerah yang lain, maupun antara negara satu dengan negara lain.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang selama lima tahun terakhir memiliki laju pertumbuhan PDB yang cenderung lambat, hal ini dapat dilihat dari nilai PDB Indonesia selama lima tahun terakhir tidak lebih dari 5 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik, dari tahun 2015 hingga tahun 2019 laju pertumbuhan PDB Indonesia berfluktuasi di kisaran 4,88 persen hingga 5,17 persen. Berikut adalah data PDB menurut harga konstan yang menunjukkan PDB riil, yaitu penambahan jumlah produksi atau output

---

<sup>1</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 165

nasional dalam tingkat harga yang sama dan menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Harga Konstan**  
**Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>PDB (Triliun Rupiah)</b>	<b>Laju PDB (Persen)</b>
<b>2015</b>	8.982,5	4,88
<b>2016</b>	9.434,6	5,03
<b>2017</b>	9.912,9	5,07
<b>2018</b>	10.425,4	5,17
<b>2019</b>	10.949,2	5,02

Sumber: Statistik Indikator Ekonomi (data diolah), 2019<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.1, laju PDB yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,17% dari tahun sebelumnya dengan nilai 10.425,4 triliun rupiah. Sedangkan laju PDB terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,88% atau 8.982,5 triliun rupiah. Kenaikan laju PDB tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,03%, dimana laju PDB tahun 2016 ini naik 0,15% dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019 dari semula 5,17% menjadi 5,02%. Pendapatan nasional dalam hal ini dapat mempengaruhi inflasi, jumlah uang beredar, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Menurut teori yang dijelaskan oleh Mangkosoebroto, bahwa pendapatan nasional berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Apabila pendapatan meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, dalam [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses 11 Juni 2020 pukul 20.15 WIB

terutama disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul pada segala aspek termasuk dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.<sup>3</sup> Demikian juga dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pendapatan nasional dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Semakin tinggi pendapatan suatu Negara, maka investasi yang tercipta akan semakin besar pula.<sup>4</sup> Peningkatan pendapatan tersebut akan diiringi dengan peningkatan pengeluaran, baik pengeluaran untuk investasi maupun konsumsi, dimana konsumsi yang tinggi akan mempercepat pengembalian modal serta keuntungan investor sehingga mendorong minat investasi. Kemudian menurut Putong dan Andjaswati sebagaimana dikutip oleh Zakiah dan Umaruddin, semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi tingkat inflasi mata uang, karena semakin banyak uang yang beredar.<sup>5</sup>

Peran pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia diwujudkan dalam bentuk kebijakan fiskal serta kebijakan moneter yang merupakan tindakan untuk mempengaruhi penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat agar tercipta stabilitas ekonomi yang diukur dalam kesempatan kerja,

---

<sup>3</sup> Guritno Mangkosoebroto, *Ekonomi Publik* (Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE UGM), hlm. 67

<sup>4</sup> Muhammad Kholis, Hubungan Antara Pendapatan Nasional Dan Investasi di Indonesia (Suatu Kajian Ekonomi Makro dengan Model VAR), *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2016, hal. 65-78

<sup>5</sup> Zakiah dan Umaruddin Usman, "Hubungan Jumlah Uang Beredar, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia Menggunakan Model Dinamis", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 02 No. 02, Agustus 2019, hlm. 100

kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.<sup>6</sup>

Diantaranya untuk mempengaruhi penawaran uang atau mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah menerapkan *Tight Money Policy* (TMP) atau kebijakan uang ketat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang dan jumlah barang yang tersedia sehingga tingkat harga pun stabil. Jumlah uang beredar terdiri atas uang kartal yang beredar di luar Bank Indonesia, bank-bank umum serta di luar Kantor Bendahara Negara dan saldo giro atau rekening koran yang bukan milik bank umum dan pemerintah.<sup>7</sup>

Tuntutan penambahan jumlah uang beredar akan terjadi ketika pendapatan nasional naik. Apabila jumlah uang yang beredar tetap, sementara pendapatan atau output nasional mengalami peningkatan menyebabkan penawaran lebih besar dari permintaan sehingga harga turun dan pelaku ekonomi kurang bergairah karena keuntungan berkurang. Sebaliknya, peningkatan uang beredar yang melebihi kenaikan output nasional akan menyebabkan inflasi sehingga diperlukan kebijaksanaan pengendalian jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi jangka pendek.

Jumlah uang yang beredar hendaknya didorong mengalir ke sektor riil, agar dapat meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa agar stabilitas harga cenderung terpelihara. Berikut ini jumlah uang yang beredar di Indonesia lima tahun terakhir.

---

<sup>6</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 1*, (Yogyakarta: BPFE, 2017) hlm. 45

<sup>7</sup> Ibid., hlm.174

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Uang Beredar Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Uang Kartal</b>	<b>Uang Giral</b>	<b>Jumlah (M1)</b>
<b>2015</b>	469,5	585,9	1.055,4
<b>2016</b>	508,1	729,5	1.237,6
<b>2017</b>	586,6	804,2	1.390,8
<b>2018</b>	625,4	831,8	1.457,2
<b>2019</b>	654,7	910,7	1.565,4

Sumber: Statistik Indikator Ekonomi (data diolah), 2019<sup>8</sup>

Dari Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) yang terdiri dari uang giral dan kartal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016, dari tahun sebelumnya 1.055,4 triliun rupiah menjadi 1.237,6 triliun rupiah. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan laju pendapatan nasional yang cukup signifikan pada tahun 2016.

Inflasi merupakan gejala naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode tertentu yang diukur dari perubahan Indeks Harga Konsumsi (IHK). Inflasi disebut juga Produk Domestik Bruto (PDB) deflator, yaitu rasio antara PDB nominal dan PDB riil. Inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan banyak masalah perekonomian diantaranya berkurangnya tabungan domestik karena pendapatan masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sumber dana investasi berkurang. Inflasi yang tinggi juga menyebabkan turunnya nilai mata uang dan mengakibatkan defisit neraca perdagangan serta memperburuk distribusi pendapatan dimana

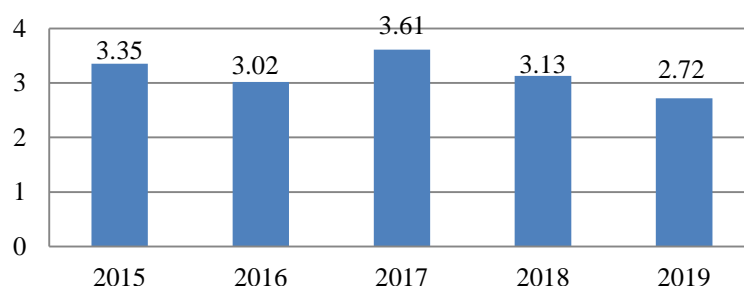
---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, dalam [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses 11 Juni 2020 pukul 20.20 WIB

orang yang pendapatannya berubah-ubah akan diuntungkan sedangkan orang yang pendapatannya tetap karena model upah kaku akan dirugikan.

Model upah kaku menunjukkan bahwa upah nominal dalam jangka pendek tidak segera menyesuaikan dengan kenaikan harga. Sehingga, ketika upah nominal tetap, inflasi menurunkan upah riil dan mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga menaikkan output nasional.<sup>9</sup> Ketika output nasional meningkat, dalam jangka panjang akan terjadi penyesuaian upah sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan konsumsi yang menyebabkan kenaikan permintaan agregat. Kenaikan permintaan agregat yang tidak diiringi dengan peningkatan penawaran agregat akan menyebabkan kenaikan harga-harga atau inflasi.

**Grafik 1.1 Laju Inflasi (YoY %)**



Sumber: Statistik Indikator Ekonomi (data diolah), 2019<sup>10</sup>

Dari Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa laju inflasi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 tergolong rendah. Pada tahun 2016, laju inflasi sebesar 3,02% yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 3,35%. Laju inflasi paling tinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 3,61% dan turun

<sup>9</sup>N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, terj. Fitria Liza dan Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 368

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, dalam [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses 11 Juni 2020 pukul 20.25 WIB

menjadi 3,13% di tahun 2018. Sedangkan laju inflasi tahun 2019 merupakan yang terendah yaitu sebesar 2,72%. Inflasi yang terlalu rendah dapat menunjukkan dua makna berbeda yaitu harga barang stabil dan terkendali atau menandakan daya beli masyarakat menurun. Kebijakan untuk mengatasi inflasi bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara pemerintah akan melakukan kebijakan moneter berupa kebijakan *Easy Money Policy* (EMP) untuk mendorong aktifitas ekonomi dan menaikkan output nasional dengan menurunkan suku bunga dan mempermudah pemberian kredit, sehingga masyarakat akan cenderung menaikkan investasi. Kenaikan jumlah investasi ini akan meningkatkan akumulasi modal yang digunakan untuk menaikkan kapasitas produksi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan meningkat diiringi dengan peningkatan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Namun, banyak perusahaan yang menggunakan mesin produksi menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Selain itu, investasi yang tidak efisien dimana perusahaan tidak menggunakan kapasitas produksinya dengan maksimal menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan pendapatan nasional.

Investasi di Indonesia terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana nilai PMA lebih besar dari PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran investasi masyarakat Indonesia masih rendah yang sebabkan kurangnya edukasi mengenai pentingnya investasi serta pendapatan yang rendah dan cenderung digunakan untuk konsumsi.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Investasi Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PMA</b>	<b>PMDN</b>	<b>Total</b>
<b>2015</b>	365,9	179,5	545,4
<b>2016</b>	396,6	216,2	612,8
<b>2017</b>	430,5	262,3	692,8
<b>2018</b>	392,7	328,6	721,3
<b>2019</b>	423,1	386,5	809,6

Sumber: Statistik Realisasi Penanaman Modal (data diolah), 2019<sup>11</sup>

Dari Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai PMDN selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan menandakan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi mulai meningkat, sementara nilai PMA mengalami penurunan pada tahun 2018 disebabkan anggapan mengenai kurangnya kesiapan dalam implementasi kebijakan pemerintah berupa transisi perizinan ke sistem *Online Single Submission* (OSS) serta kondisi ekonomi global membuat investor asing yang akan menanamkan investasi di Indonesia cenderung menunggu. Jumlah total realisasi investasi pada tahun 2015 adalah sebesar 545,5 triliun rupiah yang kemudian naik menjadi 612,8 triliun rupiah ditahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan investasi yang signifikan menjadi 692,8 triliun rupiah dan pertumbuhannya melambat di tahun 2018 menjadi 721,3 triliun rupiah kemudian naik menjadi 809,6 triliun rupiah di tahun 2019.

Kebijakan fiskal pemerintah khususnya bidang pengeluaran merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi

---

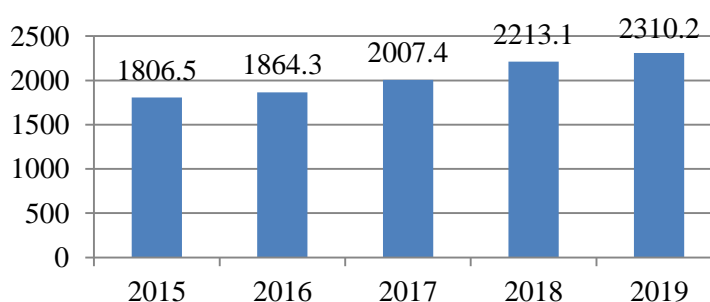
<sup>11</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA*, dalam [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id) diakses 11 Juni 2020 pukul 20.30 WIB



pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan permintaan agregat yang dapat meningkatkan pendapatan nasional karena adanya efek *multiplier*. Sehingga perlu perencanaan yang matang dan sistematis dalam pengelolaannya serta didasari pertimbangan mengenai efek yang ditimbulkan terhadap perekonomian khususnya pendapatan nasional.

Bentuk pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran rutin pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa yang digunakan sebagai sarana distribusi pendapatan melalui bantuan sosial, membiayai pembangunan infrastruktur, membiayai berbagai kegiatan strategis seperti pemilihan umum, kegiatan penanggulangan bencana dan sebagainya, serta menyediakan berbagai layanan dan fasilitas umum. Selain itu, pembayaran bunga utang dan pemberian subsidi juga merupakan bentuk pengeluaran pemerintah.

**Grafik 1.2 Realisasi Pengeluaran Belanja Pemerintah Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)**



Sumber: Realisasi Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN), 2019<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Kementerian Keuangan, *Realisasi APBN*, dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) diakses 11 Juni 2020 pukul 20.35 WIB

Menurut Grafik 1.2, diketahui bahwa realisasi pengeluaran belanja pemerintah atau realisasi dari APBN selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi pengeluaran belanja pemerintah paling besar terjadi di tahun 2018 yaitu 2.213,1 Triliun Rupiah dari tahun sebelumnya 2.007,4 Triliun Rupiah. Hal ini seiring dengan tingginya laju PDB di tahun 2018.

Fenomena tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara investasi, jumlah uang beredar, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan didukung oleh penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nindya Eka Santi, Aisyah Jumiarti, dan Fivien Muslihatinningsih bahwa investasi mempunyai hubungan kausalitas dengan Produk Domestik Bruto, berbeda dengan Ataina Zulfa Nasution, Nurlaila, dan Zainul Fuad yang menyatakan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto. Hasil penelitian yang dilakukan Asila Murdiah dan Prasetyo Ari Wibowo menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dan PDB sedangkan Chesli I.P Mentang, Vekie A. Rimate, dan Dennij Mandeij menyatakan bahwa dalam jangka pendek tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah uang beredar dan PDB.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wildan Shohabi menunjukkan bahwa inflasi dan pendapatan nasional memiliki hubungan kausalitas dua arah, sementara Ach. Zuhri dalam penelitiannya menyebutkan terdapat kausalitas satu arah yaitu inflasi mempengaruhi PDB, sebaliknya

menurut Zakiah dan Umaruddin Usman, inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan nasional, dimana pendapatan nasional membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merespon kenaikan inflasi. Hasil penelitian dari Ischak P. Lumbantobing serta Muhammad Nasir dan Diana Sari menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan pendapatan nasional. Karena perbedaan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan uji kausalitas Granger.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut serta minimnya penelitian mengenai hubungan kausalitas antara variabel makro di IAIN Tulungagung dan agar terdapat keterbaruan periode data khususnya dalam bentuk triwulanan sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Kausalitas Pendapatan Nasional terhadap Perekonomian Indonesia 2008-2019”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pertumbuhan PDB Indonesia selama lima tahun terakhir berkisar antara 4–5%, menunjukkan pertumbuhan pendapatan nasional yang cenderung lambat dan kebijakan untuk mendorong kegiatan perekonomian yang belum optimal.
2. Inflasi mengalami kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu yang mencerminkan ketidak stabilan kenaikan harga barang yang berpengaruh terhadap biaya produksi dan pendapatan. Inflasi yang terlalu rendah mengindikasikan berkurangnya daya beli masyarakat.

3. Jumlah uang beredar mencerminkan kebijakan moneter, dimana jumlah uang beredar di Indonesia selalu naik dari tahun ke tahun. Kurangnya jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan lesunya perekonomian, sedangkan kelebihan jumlah uang beredar dapat menyebabkan inflasi.
4. Investasi pada sektor riil dapat meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan output, namun pertumbuhan investasi di Indonesia masih berfluktuasi dan di dominasi oleh modal dari investor asing.
5. Kenaikan pengeluaran pemerintah berfluktuasi mengikuti pendapatan pajak dan kondisi perekonomian di Indonesia. Pengeluaran pemerintah yang melebihi pendapatan dapat menyebabkan defisit anggaran, namun apabila jumlahnya tepat akan dapat mendorong kegiatan perekonomian.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara jumlah uang yang beredar dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019 ?
2. Bagaimana hubungan kausalitas antara inflasi dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019 ?
3. Bagaimana hubungan kausalitas antara investasi dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019 ?
4. Bagaimana hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menguji hubungan kausalitas antara jumlah uang yang beredar dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019.
2. Untuk menguji hubungan kausalitas antara inflasi dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019.
3. Untuk menguji hubungan kausalitas antara investasi dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019.
4. Untuk menguji hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literasi, menambah wawasan dan edukasi terkait ekonomi makro khususnya mengenai hubungan kausalitas antara jumlah uang yang beredar, inflasi, investasi dan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan nasional.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Akademik

Memberikan sumbangsih kajian literatur sebagai bahan diskusi, menambah pengetahuan dan perbendaharaan kepustakaan di FEBI IAIN Tulungagung mengenai ekonomi makro.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian pada metode maupun bidang yang sama dengan variabel berbeda.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

a. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu biasanya satu tahun.<sup>13</sup>

b. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar (*money supply* atau M1) merupakan jumlah tertentu uang kartal ditambah dengan uang giral yang dipegang oleh masyarakat pada periode tertentu. Uang kartal adalah mata uang logam dan kertas yang beredar dalam masyarakat, yang diedarkan oleh Bank Indonesia, dan dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral yaitu dana yang disimpan pada saldo rekening

---

<sup>13</sup>Nurul Huda, et. all., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 21

koran atau giro yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk pembayaran dengan perantara cek, bilyet atau perintah membayar.<sup>14</sup>

c. Inflasi

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.<sup>15</sup>

d. Investasi

Investasi merupakan tindakan menanamkan uang, aset, dan surat-surat berharga lainnya dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai pendapatan dari investasi tersebut.<sup>16</sup>

e. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBD.<sup>17</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian dengan judul “Kausalitas antara Jumlah Uang yang Beredar dengan Pendapatan Nasional Indonesia 2012 – 2019” ini diarahkan untuk menganalisis ada atau tidaknya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara tingkat inflasi, jumlah uang yang beredar yaitu jumlah uang giral dan uang kartal, investasi yang terdiri dari

---

<sup>14</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro...*, hlm. 256

<sup>15</sup> Ekawarna dan Fachruddiansyah Muslim, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 252

<sup>16</sup>Eti Rochaety dan Ratik Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 149

<sup>17</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi:Teori Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hlm. 25

jumlah PMA dan PMDN, serta realisasi pengeluaran belanja pemerintah dengan pendapatan nasional Indonesia tahun 2008 – 2019.

### **G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan diteliti maka penulis akan memberikan batasan masalah meliputi:

- 1 Penelitian ini menggunakan nilai PDB menurut harga konstan sebagai indikator pendapatan nasional, tingkat inflasi, jumlah uang beredar menggunakan data perkembangan uang beredar dalam arti sempit yaitu uang kartal dan uang giral (M1), indikator investasi adalah akumulasi dari PMA dan PMDN, sedangkan pengeluaran pemerintah menggunakan indikator realisasi anggaran belanja pemerintah.
- 2 Data yang digunakan adalah data triwulanan periode 2008 sampai dengan tahun 2019 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik untuk data PDB dan inflasi, website Kementerian Perdagangan untuk data jumlah uang beredar, website resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk data investasi, dan dari website resmi Kementerian Keuangan untuk data pengeluaran pemerintah.

### **H. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Peneliti memandang perlu mengemukakan penulisan hasil penelitian untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini. Untuk memberikan gambaran yang jelas pada sistematika pembahasan penelitian ini terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penulis menyusun sistematika dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:



## 1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, peneliti menyajikan beberapa pembahasan yang terdiri dari: a) Latar belakang masalah;b)Rumusan masalah; c) Tujuan penelitian; d)Batasan masalah;e) Kegunaan penelitian; f) Penegasan istilah; dan g) Sistematika penulisan skripsi.

## 2. BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab kedua ini, peneliti akan menyajikan teori yang digunakan sebagai acuan di dalam pembahasan masalah yang diambil dari berbagai literatur (buku, jurnal, internet, dll.).

## 3. BAB III: METODE PENELITIAN

Untuk bab ini, peneliti akan menyajikan metode yang digunakan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, *sampling*, dan sampel;sumber dan teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data.

## 4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi penyajian dan analisis data yang meliputi deskripsi hasil atau temuan penelitian dan analisis data

## 5. BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berdasarkan rumusan masalah.

## 6. BAB VI: PENUTUP

Pada bab terakhir, dalam penelitian ini berisi kesimpulan dan saran.